



## **Penguatan Nilai Tambah Ekonomi Sektor Unggulan untuk Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar**

### ***Strengthening the Economic Added Value of Leading Sectors to Increase Regional Fiscal Independence in the Selayar Islands Regency***

**Jalil Setiawan Jamal**

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Email: [jalilsetiawan357@gmail.com](mailto:jalilsetiawan357@gmail.com)

---

#### Article Info

##### Article history :

Received : 06-06-2026

Revised : 08-06-2026

Accepted : 10-06-2026

Published : 12-06-2026

#### Abstract

*Selayar Islands Regency has significant potential in the fisheries, agriculture, and tourism sectors, but their contribution to Regional Original Income (PAD) remains relatively low. This situation indicates a gap between the region's economic potential and the fiscal capacity of the local government. This policy paper aims to analyze the factors causing the low contribution of leading sectors to PAD and formulate applicable policy recommendations. The analysis was conducted using a qualitative descriptive approach through literature review, using the USG method to determine priority issues and the Bardach approach to evaluate policy alternatives. The analysis results indicate that low economic added value is the main factor preventing the potential of leading sectors from being optimally converted into PAD sources. Therefore, a policy to downstream leading sectors through the development of processing industries, strengthening the value chain, increasing investment, and empowering MSMEs needs to be a priority in efforts to increase regional fiscal capacity. This policy is expected to stimulate economic growth while strengthening the fiscal independence of Selayar Islands Regency..*

**Keywords : Regional Original Income, Downstreaming, Economic Added Value**

---

#### Abstrak

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi besar pada sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata, namun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi daerah dan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah daerah. Makalah kebijakan ini bertujuan menganalisis faktor penyebab rendahnya kontribusi sektor unggulan terhadap PAD serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan, dengan metode USG untuk menentukan masalah prioritas dan pendekatan Bardach untuk mengevaluasi alternatif kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa rendahnya nilai tambah ekonomi merupakan faktor utama yang menyebabkan potensi sektor unggulan belum terkonversi secara optimal menjadi sumber PAD. Oleh karena itu, kebijakan hilirisasi sektor unggulan melalui pengembangan industri pengolahan, penguatan rantai nilai, peningkatan investasi, dan pemberdayaan UMKM perlu menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Kepulauan Selayar.

**Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Hilirisasi, Nilai Tambah Ekonomi**

#### PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah yang lebih luas untuk mengelola pembangunan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Berkaitan dengan



itu, kemampuan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu tolok ukur utama kemandirian fiskal. Semakin besar porsi PAD dalam total pendapatan, semakin luas pula ruang fiskal yang tersedia untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat.

Isu penguatan kapasitas fiskal daerah belakangan menjadi semakin penting untuk diperhatikan, terutama karena arah kebijakan fiskal nasional mendorong efisiensi belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran negara. Hal ini memberikan tuntutan kepada pemerintah daerah memperkuat sumber pendapatan dari dalam daerah sendiri, agar keberlanjutan pembangunan tidak mudah terpengaruh oleh perubahan kebijakan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Peningkatan PAD bukan lagi sekadar target keuangan, melainkan instrumen nyata penguatan kemandirian daerah serta peningkatan kualitas pembangunan.

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Perekonomiannya bertumpu pada sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata yang selama ini menjadi andalan. Sumber daya perikanan tangkap dan budidaya, komoditas pertanian, serta kekayaan wisata bahari merupakan modal pembangunan yang seharusnya bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus mendongkrak penerimaan daerah. Jika memperhatikan arah pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, maka kebijakan penguatan fiskal dan hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan untuk lima tahun ke depan.

Meskipun demikian, pada kenyataannya kemampuan daerah untuk mengubah potensi daerah dimaksud menjadi PAD masih terbatas. Hal dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1** Realisasi PAD, Rasio Realisasi PAD terhadap Target PAD, dan Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2025

TAHUN	TARGET PAD	REALISASI PAD	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	RASIO REALISASI PAD TERHADAP TARGET PAD (%)	RASIO PAD TERHADAP PENDAPATAN (%)
2016	52.416.704.800	43.167.309.586	875.836.941.100	82,35	4,93
2017	91.886.920.000	77.300.086.267	898.581.521.082	84,13	8,60
2018	71.274.920.000	63.941.473.428	1.044.423.219.326	89,71	6,12
2019	78.245.400.000	73.170.334.484	1.000.450.038.854	93,51	7,31
2020	84.684.347.742	66.371.401.903	984.926.367.332	78,38	6,74
2021	69.153.493.000	54.956.201.151	1.024.368.383.735	79,47	5,36
2022	65.338.430.000	54.417.747.198	1.021.771.355.236	83,29	5,33
2023	95.847.200.000	79.717.225.613	948.693.874.944	83,17	8,40
2024	109.660.630.000	75.936.589.688	1.000.332.884.417	69,25	7,59
2025	114.091.495.700	97.171.069.465	985.811.591.913	85,17	9,86

Sumber: BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar

Data realisasi selama periode 2016 hingga 2025 menunjukkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya berkisar 4,93 hingga 9,86 persen. Pada tahun 2025, realisasi PAD mencapai Rp97,17 miliar atau 9,86 persen dari total pendapatan daerah sebesar Rp985,81 miliar. Angka ini memang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, tapi lebih dari 90 persen pendapatan



daerah tetap berasal dari luar PAD. Hal ini mengindikasikan bahwa kemandirian fiskal Kabupaten Kepulauan Selayar masih relatif rendah.

Di sisi lain, struktur PAD Kabupaten Kepulauan Selayar masih didominasi oleh penerimaan yang berasal dari pelayanan kesehatan, dividen penyertaan modal pemerintah daerah, pajak daerah tertentu, dan berbagai penerimaan lainnya yang bersifat administratif. Sementara itu, kontribusi langsung dari sektor-sektor unggulan daerah masih relatif kecil. Sebagai contoh, pada tahun 2025 retribusi tempat pelelangan ikan hanya mencapai sekitar Rp110 juta, sedangkan retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga hanya sekitar Rp28 juta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang berkembang pada sektor unggulan belum mampu menciptakan nilai tambah yang cukup besar untuk dikonversi menjadi penerimaan daerah. Struktur PAD dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2** Struktur dan Realisasi PAD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dan 2025

NO	OPD	RINCIAN	REALISASI	
			TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	18.086.833.913	11.369.166.810
		Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	38.585.874.149	30.911.317.571
		Retribusi Pemakaian Laboratorium		
2	Dinas PUTR	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	11.550.000,00	11.000.000,00
		Retribusi Pemakaian Laboratorium	19.765.000,00	13.075.000,00
		Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	16.850.000,00	41.300.000,00
		Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	192.860.700,00	199.496.255,00
		Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	522.203.500,00	491.527.500,00
4	Dishub	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	497.295.940,00	533.348.820,00
		Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal		905.000,00
		Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	112.324.000,00	161.657.000,00
		Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor		
		Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.526.000,00	
5	Dinas Perikanan	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	110.214.000,00	69.401.700,00
		Retribusi Pemakaian Alat Selam	25.000.000,00	39.673.000,00
6	Disparbud	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	28.034.000,00	
		Retribusi Pemeriksaan Hewan	2.220.000,00	13.027.500,00
8	Disdagkum	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya		
		Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	388.875.000,00	354.003.700,00
9	BPKPD	Pajak Penerangan Jalan		3.812.016.484,00
		Retribusi Penyewaan Bangunan	87.150.000,00	100.750.000,00
		Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesangrahan/Vila	21.330.000,00	25.980.000,00
		PBBP2	4.200.298.540,00	3.425.495.114,00
		BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.220.813.107,00	860.366.462,00



NO	OPD	RINCIAN	REALISASI	
			TAHUN 2025	TAHUN 2024
		Pajak Air Tanah	23.112.292,00	18.926.240,00
		Pajak Sarang Burung Walet	644.250,00	
		Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	310.051.992,00	298.529.484,00
		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	12.551.864.796,00	12.005.751.676,20
		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Air Minum)		
		Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.370.635.135,53	2.351.145.353,00
		Jasa Giro pada Kas Daerah	785.302.554,72	1.297.815.136,37
		Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		1.170.033.064,00
		PBJT JASA PARKIR	29.985.000,00	
		Retribusi Penyewaan Tanah	27.620.000,00	51.224.000,00
		Opsen PKB	2.079.198.431,00	
		Opsen BBNKB	1.549.231.839,00	
		PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	4.077.103.820,00	
		PBJT-Restoran	2.245.907.833,00	2.491.651.498,00
		PBJT-Hotel	225.255.711,00	262.415.595,00
		PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	24.958.284,00	20.504.072,00
		Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	6.229.400.480,69	2.313.706.109,51
		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.509.779.197,21	1.045.389.544,33

Sumber: BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar, 2026

Fenomena ini mencerminkan kesenjangan nyata antara potensi ekonomi daerah dan kemampuan pemerintah untuk menangkap manfaat fiskalnya. Sebagian besar komoditas unggulan masih dijual sebagai bahan mentah dengan pengolahan terbatas, sehingga nilai tambah lebih banyak dinikmati daerah lain yang menjadi lokasi pengolahan lanjutan. Pengembangan pariwisata pun belum terhubung sepenuhnya dengan pengembangan UMKM, jasa pendukung wisata, maupun mekanisme penerimaan yang bisa menghasilkan manfaat fiskal optimal.

Jika hal ini tidak segera diperbaiki, maka potensi ekonomi unggulan daerah akan terus berkembang tanpa memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah. Dalam jangka panjang kondisi ini dapat memperbesar kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan yang mampu menghubungkan pengembangan sektor unggulan daerah dengan strategi peningkatan PAD sehingga aktivitas ekonomi yang berkembang di masyarakat dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan upaya peningkatan PAD Kabupaten Kepulauan Selayar. Pertama, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah sehingga kapasitas fiskal daerah belum optimal. Kedua,



sektor unggulan daerah berupa pertanian, perikanan, dan pariwisata belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar. Ketiga, struktur PAD masih didominasi oleh sumber-sumber penerimaan yang tidak secara langsung mencerminkan kinerja sektor unggulan daerah.

Untuk menentukan permasalahan yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya, salah satu teknik analisis yang dapat digunakan yaitu metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) (Yurianto, 2019). Metode ini digunakan untuk menilai tingkat urgensi suatu masalah, tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan, serta potensi perkembangan masalah apabila tidak segera ditangani melalui intervensi kebijakan. Penilaian USG dilakukan melalui *expert judgement* yang melibatkan pertimbangan penulis serta masukan/penilaian dari beberapa pejabat dan perencana perangkat daerah yang memahami kondisi fiskal dan pembangunan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar.

**Tabel 3** Kajian Permasalahan Prioritas

No	Permasalahan	U	S	G	Total
1	Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih rendah	4	4	4	12
2	Sektor unggulan daerah belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD	5	5	5	15
3	Struktur PAD masih didominasi sumber penerimaan non-sektor unggulan	4	4	3	11

Permasalahan pertama memperoleh skor 12 karena meskipun rendahnya kontribusi PAD berpengaruh terhadap kapasitas fiskal daerah, kebutuhan pembiayaan pembangunan masih dapat didukung oleh pendapatan transfer sehingga tingkat urgensinya belum berada pada kategori tertinggi. Permasalahan kedua memperoleh skor tertinggi yaitu 15 karena menyangkut sektor-sektor yang menjadi basis ekonomi utama Kabupaten Kepulauan Selayar. Apabila potensi sektor unggulan tidak mampu dikonversi menjadi sumber penerimaan daerah, maka peluang peningkatan kemandirian fiskal akan terus hilang meskipun aktivitas ekonomi masyarakat berkembang. Selain itu, tanpa intervensi kebijakan yang tepat, kesenjangan antara potensi ekonomi dan kapasitas fiskal daerah akan semakin melebar di masa mendatang. Sementara itu, permasalahan ketiga memperoleh skor 11 karena meskipun berpotensi memengaruhi stabilitas penerimaan daerah, dampaknya relatif lebih kecil dibandingkan permasalahan rendahnya kontribusi sektor unggulan terhadap PAD.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, permasalahan utama yang diprioritaskan untuk diselesaikan adalah **rendahnya kontribusi sektor unggulan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar**. Selanjutnya dilakukan analisis penyebab untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari munculnya permasalahan tersebut.

Pada level pertama, ada tiga faktor utama yang menyebabkan masalah utama diatas, diantaranya adalah terbatasnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baru yang berbasis sektor unggulan, belum kuatnya keterkaitan antara pengembangan ekonomi daerah dan peningkatan PAD, serta Rendahnya kontribusi aset daerah terhadap aktivitas ekonomi produktif. Dari tiga faktor dimaksud, untuk merumuskan akar masalah maka dirumuskan kembali faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya ketiga faktor penyebab masalah utama.

Pertama, terkait terbatasnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baru yang berbasis sektor unggulan. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya nilai tambah ekonomi sektor perikanan,



pertanian dan pariwisata, rendahnya diversifikasi usaha dan produk turunan berbasis komoditas unggulan daerah, serta terbatasnya layanan ekonomi produktif yang menghasilkan penerimaan daerah. Akibatnya, aktivitas ekonomi yang tumbuh dari sektor unggulan belum mampu menghasilkan sumber-sumber penerimaan daerah yang baru dan berkelanjutan.

Kedua, terkait belum kuatnya keterkaitan antara pengembangan ekonomi daerah dan peningkatan PAD. Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya keterkaitan antara pengembangan sektor unggulan dan peningkatan PAD, lemahnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, koperasi, dan masyarakat dalam pengembangan sektor unggulan, serta keterbatasan pemanfaatan data dalam pengelolaan potensi ekonomi daerah. Dampaknya, berbagai program pengembangan ekonomi daerah belum sepenuhnya diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan PAD.

Ketiga, terkait rendahnya kontribusi aset daerah terhadap aktivitas ekonomi produktif. Permasalahan ini disebabkan oleh masih banyaknya aset daerah yang belum dimanfaatkan secara produktif, terbatasnya kerja sama pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga, serta terbatasnya investasi yang memanfaatkan aset daerah sebagai basis kegiatan ekonomi. Akibatnya, aset daerah yang seharusnya dapat menjadi pengungkit aktivitas ekonomi dan sumber penerimaan daerah belum memberikan manfaat yang optimal.

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan, ada beberapa faktor yang membuat sektor unggulan belum banyak berkontribusi terhadap PAD diantaranya adalah tata kelola, pemanfaatan aset daerah, diversifikasi produk, maupun pengembangan layanan ekonomi produktif. Namun, faktor-faktor tersebut memiliki kedudukan yang berbeda dalam struktur penyebab masalah. Sebagian besar berperan sebagai faktor pendukung, sedangkan rendahnya nilai tambah ekonomi sektor perikanan, pertanian dan pariwisata memiliki hubungan yang paling langsung dengan peningkatan PAD dan pembentukan sumber-sumber PAD baru.

Akar masalah yang dipilih dalam makalah kebijakan ini adalah rendahnya nilai tambah ekonomi sektor perikanan, pertanian dan pariwisata. Pemilihan akar masalah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa nilai tambah merupakan mata rantai yang menghubungkan aktivitas ekonomi masyarakat dengan terbentuknya penerimaan daerah. Semakin tinggi nilai tambah yang dihasilkan suatu sektor, semakin besar peluang tumbuhnya usaha baru, investasi, aktivitas perdagangan, dan berbagai bentuk kegiatan ekonomi yang dapat menjadi basis penerimaan daerah.

Rendahnya nilai tambah ekonomi sektor unggulan dapat dilihat dari kontribusi sektor industri pengolahan yang hanya sekitar 2 persen terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar komoditas unggulan masih dipasarkan dengan tingkat pengolahan yang terbatas, sehingga potensi ekonomi daerah belum mampu menghasilkan nilai tambah yang optimal

Di sisi lain, faktor penyebab lainnya baik itu diversifikasi usaha yang masih rendah, layanan ekonomi produktif yang belum berkembang, keterkaitan pengembangan sektor unggulan dengan peningkatan PAD yang masih lemah, maupun pemanfaatan aset daerah yang belum optimal, pada dasarnya lebih merupakan faktor pendukung yang pengaruhnya tidak langsung terhadap pembentukan PAD. Sebaliknya, nilai tambah ekonomi menjadi penghubung utama antara potensi sektor unggulan dengan tumbuhnya aktivitas usaha, investasi, dan sumber-sumber penerimaan



daerah. Oleh karena itu, rendahnya nilai tambah ekonomi dinilai sebagai faktor yang paling mendasar dalam menjelaskan rendahnya kontribusi sektor unggulan terhadap PAD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Analisis struktur PAD Kepulauan Selayar juga memperlihatkan hal yang sama. Kontribusi sektor perikanan dan pariwisata terhadap PAD masih jauh di bawah potensi ekonomi yang sebenarnya dimiliki daerah ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada ketersediaan sumber daya ekonomi, melainkan pada masih rendahnya nilai tambah yang tercipta dari pemanfaatan sumber daya tersebut.

Dengan demikian, akar masalah yang menjadi fokus penyelesaian dalam makalah kebijakan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Rendahnya kontribusi sektor unggulan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Terbatasnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baru yang berbasis sektor unggulan.
3. Rendahnya nilai tambah ekonomi sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata sebagai akar masalah.

Berdasarkan identifikasi akar masalah dimaksud, maka dirumuskanlah problem statement dari makalah ini yaitu **“Rendahnya kontribusi sektor unggulan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar disebabkan masih terbatasnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baru yang berbasis sektor unggulan akibat rendahnya nilai tambah ekonomi sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata, sehingga potensi ekonomi daerah belum mampu dikonversi secara optimal menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah yang berkelanjutan”**.

Rumusan masalah tersebut menjadi fokus analisis pada bab selanjutnya dalam rangka merumuskan alternatif kebijakan dan menentukan strategi peningkatan PAD yang paling efektif untuk memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Kepulauan Selayar

## **METODE PENELITIAN**

Makalah kebijakan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari dokumen perencanaan pembangunan, laporan keuangan daerah, publikasi statistik, regulasi, serta berbagai literatur yang relevan. Analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi isu, masalah utama, penyebab masalah, dan akar masalah berdasarkan data dan fakta empiris. Penentuan masalah prioritas menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*), sedangkan pemilihan alternatif kebijakan dilakukan menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan Bardach yang mempertimbangkan aspek kelayakan teknis, ekonomi, politik, dan operasional administratif untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang paling layak diterapkan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Landasan Teoretis**

#### **1. Teori Desentralisasi Fiskal**



Desentralisasi fiskal adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah (Wahyudi et al., 2023). Kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mendorong efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsive, serta memperkuat kapasitas keuangan pemerintah (Pertiwi et al., 2026).

Dalam perspektif desentralisasi fiskal, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah merupakan indikator utama yang menunjukkan tingkat kemandirian daerah (Pertiwi et al., 2026). Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Sebaliknya, rendahnya kontribusi PAD menunjukkan tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat sehingga ruang fiskal daerah menjadi lebih terbatas.

Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Selayar, kontribusi PAD yang masih berada di bawah 10 persen menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih perlu diperkuat melalui pengembangan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi lokal.

## 2. Teori *Economic Base*

Teori *Economic Base* menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri yang menggunakan sumberdaya lokal dengan orientasi ekspor akan menghasilkan pendapatan daerah dan menciptakan peluang kerja. Menurut teori ini, perkonomian daerah dibagi menjadi sektor basis dan sektor non basis (Nur et al., 2021).

Menurut teori ini, sektor basis merupakan sektor yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan dari luar wilayah sehingga mampu menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian daerah. Semakin berkembang sektor basis, semakin besar pula aktivitas ekonomi yang tercipta pada sektor-sektor pendukung (Rumokoy et al., 2022).

Berdasarkan karakteristik wilayah dan struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata merupakan sektor basis yang memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan dari luar daerah. Oleh karena itu, strategi peningkatan PAD yang berorientasi pada penguatan sektor basis akan memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan strategi yang hanya mengandalkan peningkatan tarif pajak dan retribusi.

## 3. Teori Nilai Tambah dan Hilirisasi

Konsep nilai tambah (*value added*) menjelaskan bahwa peningkatan nilai ekonomi suatu komoditas diperoleh melalui proses pengembangan produk bahan mentah kemudian diikuti oleh pengembangan rantai pasok sampai dengan proses distribusi dan pemasaran (Supriadi et al., 2021)

Menurut Michael Porter, keunggulan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan bahan baku, tetapi juga oleh kemampuan mengelola seluruh rantai nilai mulai dari produksi hingga pemasaran (Rosaida et al., 2025).



Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan daerah, kebijakan hilirisasi merupakan strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas melalui pengembangan industri pengolahan dan diversifikasi produk olahan (Arifin & Solihin, 2025). Melalui hilirisasi, suatu daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta berdampak luas dan berkelanjutan terhadap perekonomian daerah (Jamal, 2026)

Dalam pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar, hilirisasi menjadi penting karena sebagian besar hasil perikanan, rumput laut, dan komoditas pertanian masih dipasarkan dalam bentuk primer sehingga nilai tambah ekonomi yang dihasilkan relatif rendah (Jamal, 2026)

#### 4. Konsep *Blue Economy*

Sebagai daerah kepulauan, pengembangan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar tidak dapat dilepaskan dari konsep ekonomi biru (*blue economy*). Ekonomi biru merupakan pendekatan pembangunan yang menekankan pada pemanfaatan sumberdaya atau potensi kelautan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak mengabaikan pelestarian ekosistem laut (Maeyangsari, 2023)

Konsep ekonomi biru sangat relevan dengan karakteristik Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki potensi besar pada sektor perikanan, budidaya rumput laut, dan pariwisata bahari (Jamal, 2025). Oleh karena itu, strategi peningkatan PAD melalui hilirisasi sektor kelautan dan perikanan sejalan dengan prinsip pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan.

### Landasan Kebijakan

#### 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029

Strategi peningkatan PAD melalui penguatan hilirisasi sektor unggulan di Kabupaten Kepulauan Selayar sejalan dengan arah pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029 sebagai tahap awal RPJPN 2025–2045 dan implementasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Kebijakan ini mendukung Asta Cita ke-3, yaitu meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, serta Asta Cita ke-5 tentang hilirisasi dan industrialisasi untuk menaikkan nilai tambah di dalam negeri. Hilirisasi sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata membuka jalan bagi sumber daya lokal untuk diolah menjadi produk dan jasa bernilai lebih tinggi, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas lapangan kerja (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2025).

Sejalan dengan itu, RPJMN 2025–2029 juga menekankan transformasi ekonomi melalui penguatan UMKM dan koperasi, pariwisata berkelanjutan, serta pengembangan wilayah Sulawesi sebagai pusat pertumbuhan berbasis sumber daya alam dan kemaritiman. Di Kabupaten Kepulauan Selayar, penguatan hilirisasi berbasis pemanfaatan aset daerah dan layanan ekonomi produktif bukan sekadar strategi fiskal lokal, tapi bagian dari agenda yang lebih besar menuju Indonesia Emas 2045 yang akan menaikkan nilai tambah komoditas unggulan, memperluas basis penerimaan daerah, dan membangun kemandirian fiskal yang tahan lama (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2025).



## 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029

Strategi peningkatan PAD melalui penguatan hilirisasi sektor unggulan berkaitan erat dengan arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025–2029. Dalam RPJMD dikemukakan bahwa ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat masih sangat tinggi, sementara kontribusi PAD terhadap struktur pendapatan daerah masih rendah. Di sisi lain, hilirisasi produk unggulan serta industrialisasi sektor perikanan dan pariwisata juga belum berjalan optimal, terhambat oleh keterbatasan investasi dan belum berkembangnya industri pengolahan yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi (Bapperida Kepulauan Selayar, 2025).

Untuk menjawab kondisi itu, RPJMD menetapkan sejumlah arah kebijakan diantaranya peningkatan produktivitas sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata; percepatan hilirisasi sumber daya alam unggulan; penguatan UMKM dan koperasi; peningkatan investasi daerah; serta penguatan fiskal melalui optimalisasi sumber pendapatan yang sesuai dengan potensi ekonomi lokal. Kebijakan penguatan hilirisasi sektor unggulan berbasis pemanfaatan aset daerah dan pengembangan layanan ekonomi produktif bukan merupakan inisiatif yang berdiri sendiri, melainkan implementasi langsung dari arah yang sudah ditetapkan RPJMD untuk mendorong nilai tambah komoditas unggulan, memperluas basis pendapatan daerah, dan memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Kepulauan Selayar (Bapperida Kepulauan Selayar, 2025).

### **Analisis Potensi dan Struktur PAD Kabupaten Kepulauan Selayar**

Kabupaten Kepulauan Selayar bertumpu pada tiga sektor unggulan: perikanan, pertanian, dan pariwisata. Dalam kerangka teori Economic Base, ketiganya tergolong sektor basis karena menghasilkan pendapatan dari luar daerah sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui efek pengganda. Sumber daya kelautan yang luas, komoditas pertanian yang kompetitif, dan destinasi wisata bahari yang berkembang mestinya cukup untuk menopang kapasitas fiskal daerah secara signifikan.

Namun demikian, struktur PAD Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari sektor unggulan tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi penerimaan daerah. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah selama periode 2016–2025 masih berada di bawah 10 persen, sementara penerimaan yang secara langsung berasal dari sektor perikanan dan pariwisata relatif kecil dibandingkan potensi ekonominya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi daerah dan kemampuan pemerintah daerah dalam menangkap manfaat fiskal dari aktivitas ekonomi yang berkembang, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang menyebabkan sektor unggulan belum memberikan kontribusi optimal terhadap PAD.

### **Analisis Hilirisasi sebagai Instrumen Peningkatan PAD**

Potensi sektor unggulan Kabupaten Kepulauan Selayar belum menghasilkan PAD secara optimal karena rendahnya nilai tambah ekonomi yang terbentuk. Sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata memang berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah, tapi aktivitas yang dominan masih berhenti di tahap produksi primer. Akibatnya, manfaat ekonomi yang bisa ditarik dari sektor-



sektor itu terbatas, dan peluang untuk membuka usaha baru, menarik investasi, maupun memperluas objek retribusi belum berkembang.

Dalam literatur pembangunan daerah, ada beberapa cara untuk mendorong nilai tambah diantaranya pengembangan industri pengolahan (Supriadi et al., 2021), diversifikasi produk (Dahlia et al., 2022), penguatan rantai nilai (Yusnawati et al., 2022), peningkatan investasi (Sabyan et al., 2025), dan perluasan layanan ekonomi produktif (Dewantara et al., 2024). Masing-masing pendekatan berbeda jalur, tapi tujuannya sama, yaitu memperluas aktivitas ekonomi agar sumber daya daerah menghasilkan manfaat yang lebih besar.

Salah satu cara yang cukup banyak dipakai adalah mengembangkan aktivitas hilir dari komoditas unggulan. Komoditas tidak sekadar diproduksi lalu dijual mentah, tapi juga diolah, dikemas, didistribusikan, bahkan dikembangkan menjadi produk atau layanan dengan nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi. Semakin tinggi nilai tambahnya, semakin besar peluang terbentuknya usaha baru, lapangan kerja, investasi, dan sumber-sumber PAD baru.

Pendekatan ini relevan untuk Kabupaten Kepulauan Selayar. Struktur ekonomi daerah masih bertumpu pada sektor-sektor dengan potensi hilirisasi besar yang belum banyak digarap. Peningkatan nilai tambah pada sektor unggulan karena itu menjadi salah satu prasyarat konkret bagi daerah yang ingin memperluas basis pendapatannya dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.

### **Analisis Kesesuaian dengan Arah Kebijakan RPJMD**

Strategi peningkatan PAD melalui hilirisasi sektor unggulan sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029.

RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 mengarahkan pembangunan sektor pertanian dan perikanan melalui peningkatan produktivitas komoditas unggulan, penguatan sistem logistik dan rantai dingin, pengembangan pemasaran dan ekspor, penguatan kelembagaan usaha, serta peningkatan daya saing sumber daya manusia. Selain itu, RPJMD juga mendorong pembangunan pariwisata berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas, pengembangan industri pendukung pariwisata, pengembangan SDM pariwisata, dan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat.

Lebih lanjut bahwa RPJMD juga menjadikan kebijakan penguatan fiskal daerah dan hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah untuk lima tahun kedepan. Arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PAD melalui hilirisasi sektor unggulan bukan merupakan kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, kebijakan peningkatan PAD yang berorientasi pada hilirisasi memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar karena didukung oleh arah kebijakan pembangunan daerah yang sudah tersedia.

### **Alternatif Kebijakan**

Dalam makalah kebijakan ini, penulis bertindak sebagai evaluator yang menilai berbagai alternatif kebijakan dari perspektif Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pengambil



keputusan. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing alternatif dalam menyelesaikan akar permasalahan, meningkatkan PAD, kesesuaiannya dengan kewenangan pemerintah daerah, kebutuhan sumber daya, serta keberlanjutan dampak ekonomi yang dihasilkan.

Berdasarkan analisis sebelumnya, permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Selayar dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah rendahnya kontribusi sektor unggulan daerah terhadap penerimaan daerah. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya nilai tambah ekonomi pada sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata akibat belum berkembangnya aktivitas hilir dan layanan ekonomi produktif yang mampu mengonversi potensi ekonomi daerah menjadi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang berkelanjutan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dirumuskan beberapa alternatif kebijakan yang dapat ditempuh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka meningkatkan PAD sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Alternatif pertama adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, yang dijalankan melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada, pemutakhiran basis data objek pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi sistem pembayaran, dan penguatan pengawasan kebocoran penerimaan. Alternatif ini relatif mudah dijalankan karena bisa memanfaatkan kelembagaan, regulasi, dan SDM yang sudah tersedia, dengan kebutuhan pembiayaan yang rendah dan tambahan penerimaan yang bisa dirasakan lebih cepat.

Namun, kemampuan alternatif ini dalam menyelesaikan akar permasalahan masih terbatas. Penerimaan yang dihasilkan pada dasarnya hanya berasal dari optimalisasi sumber PAD yang sudah ada, tanpa menciptakan pertumbuhan ekonomi baru. Pada Kabupaten Kepulauan Selayar yang basis ekonominya masih sempit, ruang untuk menaikkan PAD lewat jalur ini pun ikut terbatas. Alternatif ini lebih tepat ditempatkan sebagai langkah jangka pendek untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

Alternatif kedua adalah optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan pengembangan sektor pariwisata. Alternatif ini dilakukan melalui inventarisasi dan optimalisasi aset produktif milik pemerintah daerah, peningkatan kualitas pengelolaan destinasi wisata, penerapan sistem tiket elektronik, penguatan promosi wisata, serta pengembangan kerja sama pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi wisata bahari yang cukup besar sehingga alternatif ini memiliki peluang untuk meningkatkan PAD melalui retribusi wisata, pemanfaatan aset daerah, dan berbagai aktivitas ekonomi yang berkembang di sekitar kawasan wisata. Fokus utama alternatif ini adalah meningkatkan penerimaan dari aset dan aktivitas wisata yang telah ada, bukan menciptakan nilai tambah melalui pengembangan aktivitas hilir sektor unggulan

Dampak ekonominya lebih luas dibanding alternatif pertama karena bisa mendorong usaha masyarakat, menaikkan kunjungan wisatawan, dan menggerakkan sektor pendukung seperti perdagangan, transportasi, kuliner, dan ekonomi kreatif. Alternatif ini juga selaras dengan arah pembangunan daerah yang menempatkan pariwisata sebagai sektor unggulan. Namun peningkatan PAD yang dihasilkan masih sangat bergantung pada faktor eksternal seperti aksesibilitas wilayah, daya tarik destinasi, dan jumlah kunjungan. Penerimaan yang tercipta pun masih terkonsentrasi di sektor tertentu, sehingga belum cukup untuk memperluas basis pendapatan daerah secara signifikan.



Alternatif ketiga adalah pengembangan hilirisasi sektor unggulan dan diversifikasi sumber pendapatan daerah. Arah kebijakannya mencakup pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, rumput laut, dan komoditas pertanian unggulan, penguatan rantai nilai sektor pariwisata, pengembangan UMKM berbasis potensi lokal, peningkatan investasi, penguatan peran BUMD, serta digitalisasi tata kelola pendapatan daerah. Berbeda dari dua alternatif sebelumnya, alternatif ini tidak hanya mengejar tambahan penerimaan, tapi juga memperkuat struktur ekonomi daerah sebagai fondasi pertumbuhan PAD jangka panjang.

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi sumber daya perikanan, pertanian, dan pariwisata yang cukup besar, namun sebagian besar masih menghasilkan nilai tambah yang rendah karena dominasi aktivitas ekonomi primer. Melalui hilirisasi, komoditas unggulan tidak lagi hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Kondisi tersebut akan menciptakan aktivitas usaha baru, meningkatkan investasi, memperluas kesempatan kerja, memperkuat UMKM, serta memperbesar basis pajak dan retribusi daerah. Peningkatan PAD yang dihasilkan tidak hanya berasal dari optimalisasi sumber penerimaan yang sudah ada, tetapi juga dari tumbuhnya sumber-sumber pendapatan baru yang lebih berkelanjutan.

Selain memiliki dampak ekonomi yang paling besar, alternatif ini juga memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi dengan arah kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Pemerintah pusat saat ini mendorong agenda hilirisasi sumber daya alam, transformasi ekonomi, dan pengembangan ekonomi biru, sementara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui RPJMD telah menetapkan penguatan sektor unggulan, pengembangan UMKM, peningkatan investasi, dan penguatan kapasitas fiskal daerah sebagai prioritas pembangunan. Oleh karena itu, alternatif ini dinilai memiliki prospek keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan alternatif lainnya.

Untuk menentukan alternatif kebijakan yang paling layak diterapkan, dilakukan evaluasi menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Bardach. Evaluasi dilakukan berdasarkan empat kriteria utama, yaitu kelayakan teknis (*technical feasibility*), kelayakan ekonomi dan keuangan (*economic and financial possibility*), kelayakan politik (*political viability*), dan kemudahan implementasi administratif (*administrative operability*) (Aldhila et al., 2021). Penilaian dilakukan dengan rentang skor 1 sampai 5, di mana skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kelayakan yang lebih baik. Sama halnya dengan penentuan masalah utama, penentuan alternatif kebijakan dilakukan melalui *expert judgement* yang melibatkan pertimbangan penulis serta masukan/penilaian dari beberapa pejabat dan perencana perangkat daerah yang memahami kondisi fiskal dan pembangunan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penilaian terhadap masing-masing alternatif kebijakan mengacu pada kondisi eksisting Kepulauan Selayar, data potensi ekonomi daerah, arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, kapasitas fiskal pemerintah daerah, serta hasil analisis di bab sebelumnya. Skor yang diberikan bukan angka mutlak, tapi alat bantu untuk membandingkan kelayakan relatif tiap alternatif kebijakan berdasarkan kriteria yang dikembangkan Bardach.



Tabel 4 Matriks Evaluasi Alternatif Kebijakan

Kriteria Penilaian	Bobot	Alternatif 1 Intensifikasi Pajak dan Retribusi	Alternatif 2 Optimalisasi Aset dan Pariwisata	Alternatif 3 Hilirisasi Sektor Unggulan
Kelayakan Teknis	25%	5	4	4
Kelayakan Ekonomi dan Keuangan	35%	3	4	5
Kelayakan Politik	15%	4	4	5
Kemudahan Implementasi Administratif	25%	5	4	4
<b>Skor Tertimbang</b>	<b>100%</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,50</b>
<b>Peringkat</b>		<b>II</b>	<b>III</b>	<b>I</b>

Penilaian terhadap ketiga alternatif kebijakan dilakukan berdasarkan empat kriteria: kelayakan teknis, kelayakan ekonomi dan keuangan, kelayakan politik, serta kemudahan implementasi administratif. Pemberian skor mempertimbangkan kondisi eksisting Kabupaten Kepulauan Selayar, kapasitas fiskal daerah, kewenangan pemerintah daerah, dukungan pemangku kepentingan, dan kemampuan implementasi kebijakan.

Kriteria kelayakan ekonomi dan keuangan memiliki bobot terbesar karena tujuan utama kebijakan dalam makalah ini adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan. Selain itu, penetapan bobot juga mempertimbangkan keterbatasan kapasitas fiskal Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga alternatif kebijakan yang mampu menghasilkan dampak ekonomi dan fiskal jangka panjang memperoleh prioritas yang lebih tinggi. Selanjutnya, kelayakan teknis dan kemudahan implementasi administratif diberikan bobot yang relatif tinggi mengingat keterbatasan kapasitas fiskal dan kelembagaan daerah, sedangkan kelayakan politik memiliki bobot yang lebih rendah karena ketiga alternatif pada dasarnya masih berada dalam koridor kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah.

Pada kelayakan teknis, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah mendapat skor tertinggi (5) karena regulasi, kelembagaan, dan mekanisme pemungutannya sudah tersedia. Dua alternatif lainnya, optimalisasi aset dan pariwisata serta hilirisasi sektor unggulan, masing-masing mendapat skor 4. Optimalisasi aset masih perlu penataan dan peningkatan kualitas pengelolaan destinasi, sementara hilirisasi, meski didukung potensi sumber daya yang besar, masih membutuhkan penguatan infrastruktur, kapasitas SDM, dan kemitraan usaha.

Pada kelayakan ekonomi dan keuangan, hilirisasi sektor unggulan unggul dengan skor 5 karena paling berpotensi menciptakan nilai tambah ekonomi, memperluas basis usaha, menarik investasi, dan menghasilkan efek berganda yang berkelanjutan. Optimalisasi aset dan pariwisata mendapat skor 4 karena manfaat ekonominya cukup nyata, tapi masih sangat bergantung pada kunjungan wisatawan dan kondisi pasar. Intensifikasi pajak dan retribusi mendapat skor 3 karena tambahan penerimaannya terbatas pada basis yang sudah ada dan tidak langsung menciptakan sumber pertumbuhan baru

Pada kelayakan politik, hilirisasi kembali mendapat skor tertinggi (5). Keselarasannya dengan kebijakan nasional tentang hilirisasi dan transformasi ekonomi, sekaligus dengan prioritas RPJMD daerah, memberi alternatif ini pijakan politik yang kuat. Intensifikasi pajak dan retribusi



serta optimalisasi aset dan pariwisata masing-masing mendapat skor 4, karena umumnya bisa diterima pemangku kepentingan, meski keduanya berpotensi menghadapi resistensi jika peningkatan penerimaan daerah dipersepsikan menambah beban masyarakat atau pelaku usaha.

Pada kemudahan implementasi administratif, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak kembali mendapat skor tertinggi (5) karena bisa dijalankan lewat struktur organisasi dan mekanisme kerja yang sudah berjalan. Dua alternatif lainnya mendapat skor 4, dengan catatan yang serupa: keduanya memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah yang lebih kompleks, mencakup sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pengelolaan aset, dan pengembangan sektor ekonomi.

Berdasarkan hasil evaluasi, alternatif yang dipilih adalah pengembangan **hilirisasi sektor unggulan dan diversifikasi sumber pendapatan daerah**. Pilihan ini didasarkan karena alternatif ini memiliki kemampuan paling tinggi dalam menjawab akar permasalahan yang telah diidentifikasi pada Bab I, yaitu masih terbatasnya sumber-sumber PAD baru berbasis sektor unggulan akibat rendahnya nilai tambah ekonomi sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata. Melalui pengembangan aktivitas hilir, peningkatan investasi, penguatan UMKM, dan penciptaan layanan ekonomi produktif, alternatif ini tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah dalam jangka pendek, tetapi juga memperluas basis ekonomi dan basis pendapatan daerah secara berkelanjutan.. Alternatif terpilih ini menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi implementasi yang dibahas pada bab selanjutnya.

### **Rekomendasi Kebijakan**

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, analisis akar penyebab, dan evaluasi alternatif kebijakan pada bab sebelumnya, permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Selayar dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah belum optimalnya kontribusi sektor unggulan daerah terhadap PAD. Sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata memang mendominasi aktivitas ekonomi masyarakat, tapi nilai tambah yang dihasilkan belum berhasil dikonversi menjadi sumber penerimaan daerah secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain hilirisasi yang belum berkembang, pemanfaatan aset daerah sebagai instrumen ekonomi produktif yang masih terbatas, dan pengembangan sektor unggulan yang belum terintegrasi dengan strategi peningkatan PAD.

Berdasarkan analisis alternatif kebijakan dengan pendekatan Bardach, alternatif yang dipilih adalah pengembangan hilirisasi sektor unggulan dan diversifikasi sumber pendapatan daerah. Kebijakan yang direkomendasikan adalah Penguatan Hilirisasi Sektor Unggulan Berbasis Pemanfaatan Aset Daerah dan Pengembangan Layanan Ekonomi Produktif untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Agar arah pelaksanaannya jelas, kebijakan ini perlu ditetapkan melalui Peraturan Bupati tentang Roadmap Hilirisasi Sektor Unggulan dan Pengembangan Layanan Ekonomi Produktif untuk Peningkatan PAD. Peraturan ini yang jadi pegangan bagi perangkat daerah dalam menyusun program, mengoptimalkan aset daerah, mengembangkan layanan ekonomi produktif, memperkuat peran Koperasi Merah Putih, dan mengintegrasikan target peningkatan PAD ke dalam pengembangan sektor unggulan secara terkoordinasi.

Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui perubahan pendekatan pembangunan sektor unggulan yang selama ini berfokus pada peningkatan produksi menjadi pendekatan yang



berorientasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi. Dalam konteks ini, pemerintah daerah tidak perlu membangun industri pengolahan berskala besar yang melampaui kapasitas fiskalnya. Peran pemerintah daerah lebih sebagai fasilitator yang menyediakan infrastruktur pendukung, layanan ekonomi produktif, dan regulasi yang mendorong tumbuhnya aktivitas hilirisasi di sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata. Pemerintah daerah perlu menetapkan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen kelembagaan dalam roadmap hilirisasi sektor unggulan daerah. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah usaha masyarakat, tapi juga sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan layanan ekonomi produktif, pemasaran komoditas unggulan, penguatan UMKM, dan pengembangan ekonomi desa.

Langkah pertama implementasinya adalah mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sebagai infrastruktur pendukung hilirisasi sektor unggulan. Pemerintah daerah perlu menginventarisasi dan menata ulang aset-aset produktif yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan nilai tambah komoditas unggulan. Aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal bisa dikembangkan menjadi rumah kemasan, pusat promosi produk unggulan, sentra pemasaran hasil perikanan, pusat layanan UMKM, atau fasilitas pendukung pariwisata. Pendekatan ini lebih realistis dibanding membangun infrastruktur baru karena memanfaatkan sumber daya yang sudah ada dengan investasi yang jauh lebih rendah.

Pada sektor perikanan, kebijakan diarahkan pada revitalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan fasilitas pendukung perikanan menjadi pusat layanan ekonomi perikanan yang terintegrasi dengan Koperasi Merah Putih di wilayah pesisir. Selain sebagai tempat transaksi hasil tangkapan, fasilitas ini dikembangkan untuk menyediakan layanan penyimpanan dingin, penanganan pascapanen, pengemasan, pemasaran, dan distribusi hasil perikanan. Koperasi Merah Putih berperan sebagai agregator yang menghimpun hasil produksi nelayan, mengelola layanan pascapanen, dan memperkuat posisi tawar nelayan dalam rantai pemasaran. Nilai tambah komoditas perikanan bisa terdongkrak dari sini, sekaligus membuka sumber penerimaan daerah dari pemanfaatan fasilitas dan aset yang dikelola pemerintah daerah.

Pada sektor pertanian, kebijakan diarahkan pada pengembangan sentra hilirisasi komoditas unggulan berbasis koperasi yang memanfaatkan aset daerah sebagai pusat produksi bersama, rumah kemasan, dan pusat distribusi produk lokal. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi Koperasi Merah Putih untuk mengembangkan produk olahan berbasis komoditas unggulan, sehingga tidak lagi dijual mentah begitu saja. Model ini memperluas aktivitas ekonomi desa, memperkuat keberlanjutan usaha petani, dan menciptakan basis usaha baru yang pada akhirnya ikut menambah penerimaan daerah.

Pada sektor pariwisata, kebijakan diarahkan pada penguatan rantai nilai ekonomi wisata melalui pengembangan usaha ekonomi lokal yang dikelola masyarakat dan Koperasi Merah Putih di sekitar destinasi wisata. Pemerintah daerah perlu mendorong pengelolaan pusat kuliner, sentra cenderamata, jasa wisata, dan layanan pendukung lainnya melalui kemitraan antara koperasi, UMKM, dan pemerintah daerah. Manfaat ekonomi pariwisata pun tidak lagi terkonsentrasi pada pelaku usaha tertentu, tapi mengalir lebih merata ke masyarakat lokal, sekaligus memperkuat basis penerimaan daerah dari aset dan aktivitas usaha yang berkembang di kawasan wisata.

Untuk memastikan manfaat ekonomi yang dihasilkan agar sektor unggulan bisa dikonversi menjadi penerimaan daerah secara optimal, sistem pengelolaan pendapatan daerah perlu diperkuat



melalui digitalisasi. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem digital untuk pengelolaan retribusi sektor perikanan, destinasi wisata, dan pemanfaatan aset daerah. Digitalisasi ini menekan kebocoran penerimaan, meningkatkan akurasi data, dan memperkuat pengawasan terhadap seluruh aktivitas ekonomi yang memanfaatkan fasilitas milik daerah. Pada saat yang sama, data yang terkumpul menjadi pijakan yang lebih solid untuk pengambilan keputusan pembangunan ekonomi daerah.

Untuk menjamin efektivitas implementasi kebijakan, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan target peningkatan PAD ke dalam perencanaan pembangunan sektor unggulan. Setiap program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata perlu disertai analisis potensi dampaknya terhadap penerimaan daerah. Pengembangan ekonomi daerah tidak cukup diukur dari angka produksi dan pertumbuhan ekonomi saja, tapi juga dari seberapa besar kontribusinya terhadap kapasitas fiskal daerah.

Pelaksanaan kebijakan ini memerlukan koordinasi yang kuat antarperangkat daerah, terutama antara Bapperida, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Oleh karena itu, Bupati perlu menetapkan mekanisme koordinasi lintas sektor melalui pembentukan tim percepatan hilirisasi sektor unggulan yang bertugas mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan secara terpadu.

## KESIMPULAN

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi ekonomi yang besar pada sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata, namun potensi tersebut belum mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa rendahnya nilai tambah ekonomi merupakan akar masalah yang menyebabkan sektor unggulan belum mampu menciptakan sumber-sumber penerimaan daerah secara signifikan. Aktivitas ekonomi yang masih didominasi oleh kegiatan primer menyebabkan terbatasnya pertumbuhan usaha produktif, investasi, dan objek pajak maupun retribusi daerah. Oleh karena itu, peningkatan PAD perlu diarahkan pada kebijakan yang mendorong hilirisasi sektor unggulan melalui pengembangan industri pengolahan, penguatan rantai nilai, peningkatan investasi, dan pemberdayaan UMKM. Strategi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah, tetapi juga memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Kepulauan Selayar secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldhila, A., Herawati, A. R., & Kismartini. (2021). Alternatif Kebijakan Dalam Mengatasi Perilaku Digital di Indonesia. *Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI)*, 1(2), 98–110.
- Arifin, L. A., & Solihin, D. (2025). Hilirisasi Pangan Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi Kewirausahaan*, 5(2), 19–27. <https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/jpeaku>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025). *Ringkasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029*.
- Bapperida Kepulauan Selayar. (2025). *Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029*.



- Dahlia, Nurhidayah, Rahmah, M. H., Adilah, Cristi, N. K. V., & Chasana. (2022). Upaya Peningkatan Nilai Ekonomi Melalui Diversifikasi Produk Sajak Sebagai Alternatif Minuman Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 87–94. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v5i1.35973>
- Dewantara, H., Bado, B., Hasbiah, S., Hasdiansa, I. W., & Kemalasari, A. A. (2024). Enhancing Added Value of Village Agriculture Sector through Strengthening the Capacity of BUMDes Based on Digital Economy. *Jurnal Sipakatau*, 2(1), 269–279. <https://doi.org/10.61220/sipakatau>
- Jamal, J. S. (2025). Policy Paper: Kebijakan Pengembangan Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Kepulauan Selayar Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(6), 11028–11041. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Jamal, J. S. (2026). Policy Paper: Kebijakan Pemulihan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar Pasca Pandemi Covid-19. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 9(1), 199–213.
- Maeyangsari, D. (2023). Ekonomi Biru sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Perspektif Hukum*, 23(1), 106–126. <https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.172>
- Nur, M., Katman, M. N., Sudirman, & Bahrudin. (2021). Potensi Pertumbuhan Ekonomi Dan Sektor Unggulan Dalam Perekonomian Kota Parepare. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 8(2), 157–173.
- Pertiwi, H., Yenni, M. I., & Rusmini, A. (2026). Desentralisasi Fiskal sebagai Instrumen Otonomi Daerah di Indonesia: Systematic Literature Review. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 10365–10371. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5009>
- Rosaida, L., Wijyantini, B., & Sari, M. I. (2025). Analisis Rantai Nilai (Value Chain) Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Keunggulan Kompetitif (Studi Kasus Pada UMKM Kripik Tempe Pecah 1000 di Desa Kaliboto Lor, Lumajang). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 1–15. <https://doi.org/10.53697/emak.v6i3.2693>
- Rumokoy, E. H., Engka, D. S. M., & Walewangko, E. N. (2022). Pengaruh Sektor Basis dan Non-Basis terhadap PDRB Per Kapita di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(4), 62–76.
- Sabyan, M., Herlin, F., Ekonomi, P., Universitas, P., & Jambi, M. (2025). Peran Investasi Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Masa Ketidakpastian Ekonomi Global di Indonesia. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 13(4), 183–192.
- Supriadi, D., Nugraha, E. H., Widayaka, R., & Rena. (2021). Analisis Nilai Tambah (Value Added) Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan di Kota Cirebon. *JURNAL INVESTASI*, 7(2), 1–12.
- Wahyudi, T., Nawawi, M., & Pohan, E. S. (2023). Desentralisasi Fiskal dan Efisiensi Anggaran: Tinjauan Sistematis. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, 2(2), 32–49. <https://doi.org/10.24246/dekat.v2i2.15509>
- Yurianto, Y. (2019). Analisis Strategi Pemberdayaan Ekonomi Dengan Pendekatan USG Dan SWOT. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 3(2), 203–226. [https://doi.org/10.22236/alurban\\_vol3/is2pp203-226](https://doi.org/10.22236/alurban_vol3/is2pp203-226)



---

Yusnawati, L., Zeki, M., Nadya, Y., Handayani, N., Sabardi, W., & Dewiyana. (2022). Rancangan Model Value Chain untuk Meningkatkan Nilai Tambah Pada Umkm Kerupuk Mangrove di Kota Langsa. *Jurnal ARTI : Aplikasi Rancangan Teknik Industri*, 17(1), 33–41.